



Dampak Korupsi Pertamina Oplosan Terhadap Kepercayaan Publik

Siti Isyfaiah^{1*}, Tika Dwi Istiani², Irfa Rosyi Safira³, Elsa Indah Sanjaya⁴, Muhammad Salisul Khakim⁵, Muhammad Fajrus Shodiq⁶

¹Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta
isyfa.izah2018@gmail.com

Abstract. The mixed Pertamina corruption case for the 2018-2023 period, which was revealed in early 2025, has cost the state around IDR 193.7 trillion. The modus operandi involves purchasing low-octane fuel (RON 90) which is paid for Pertamina (RON 92), then blending it at private depots and selling it to consumers at a premium price. This research aims to examine the impact of mixed Pertamina corruption on public trust. Using qualitative methods with a descriptive analytical approach, this research analyzes secondary data and documents related to the case. The research results show that this case significantly reduces public trust in the government, law enforcement and BUMN (Pertamina). This decline in trust was confirmed by Celios survey data (2025) which revealed that 86.4% of consumers felt disadvantaged, 55.3% experienced vehicle damage, and 62.7% felt a decrease in quality. Furthermore, this crisis of confidence has had a real impact on Pertamina's business, marked by a decline in Pertamina sales of 5% in February 2025. This case highlights the weakness of the national energy governance monitoring system. The implication is that strict law enforcement and governance reform are needed to restore public trust.

Keywords: Fuel Corruption, Blending Pertamina, Public Trust, State Losses

Pendahuluan

Fenomena korupsi di Indonesia telah lama menjadi masalah yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti penyakit yang berkembang dari elitis, endemik, hingga sistemik, korupsi tidak lagi hanya menjadi masalah segelintir pejabat, tetapi telah menjangkiti berbagai lapisan masyarakat dan institusi. Dalam konteks ini, korupsi tidak hanya merusak tatanan hukum dan pemerintahan, tetapi juga menimbulkan disharmonisasi politik, ekonomi, dan sosial yang mendalam (Lamijan, 2022). Korupsi bahkan disebut-sebut telah menjadi semacam budaya baru, di mana nilai-nilai sosial seperti kerja keras, kebersamaan, dan tenggang rasa perlahan tergerus oleh pragmatisme dan keserakahan. Dampak dari praktik korupsi sangatlah luas dan kompleks. Secara ekonomi, korupsi menyebabkan penurunan produktivitas nasional, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatnya utang negara (Putri, 2023). Korupsi juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi, karena

para investor kehilangan kepercayaan terhadap kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Akibatnya, pembangunan nasional pun terhambat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Proyek-proyek infrastruktur, misalnya, kerap menjadi ladang subur praktik korupsi, mulai dari penggelapan anggaran hingga penyuapan dan pemerasan. Hal ini berujung pada pembangunan infrastruktur yang berkualitas rendah, tidak memenuhi standar keamanan, dan sering kali membahayakan masyarakat. Dampak sosial dari korupsi pun tak kalah serius. Praktik korupsi menghambat akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap sumber daya ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Ketimpangan sosial semakin melebar, dan masyarakat miskin semakin terpinggirkan. Dalam jangka panjang, korupsi mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara, termasuk lembaga legislatif dan eksekutif. Ketika harapan masyarakat terhadap wakil rakyat dan pemerintah runtuh akibat skandal korupsi, legitimasi negara pun dipertaruhkan.

Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Definisi ini sejalan dengan pandangan *Transparency International* yang menyebut korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi, yang mengikis kepercayaan dan melemahkan demokrasi (aclc.kpk.go.id, 2023; transparency.org, n.d). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengartikannya sebagai perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. Berbagai teori menjelaskan penyebab korupsi, termasuk teori GONE (*Greed, Opportunity, Needs, dan Exposures*) yang mengindikasikan bahwa keserakahan, kesempatan akibat lemahnya pengawasan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan kurangnya pengungkapan adalah faktor pendorong utama (Bologne, 1993). Dalam kasus pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) seperti pertamax, kerugian yang timbul sangat besar; sebagai contoh, selisih harga antara Paltite dan Pertamina sekitar Rp2.000 per liter dapat menyebabkan kerugian konsumen mencapai Rp 61,74 triliun selama periode 2018-2023. Angka ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi (Celios dan LBH Jakarta, 2025).

Kerugian besar ini secara langsung mempengaruhi konsep kepercayaan publik (*public trust*), yang merupakan pilar fundamental bagi keberlangsungan demokrasi dan efektivitas pemerintahan. Kepercayaan publik didefinisikan sebagai keyakinan masyarakat bahwa pemerintah dan institusi publik akan bertindak secara kompeten, adil, transparan, dan demi kepentingan terbaik warga negara. Dimensi kepercayaan publik mencakup kepercayaan terhadap pemerintah (eksekutif, legislatif, yudikatif), institusi publik (kepolisian, militer, lembaga anti-korupsi), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina. Korupsi, secara khusus, adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Ini mengikis legitimasi institusi, merugikan pelayanan

publik dengan mengalihkan dana dari sektor vital, menciptakan siklus ketidakpercayaan, berdampak negatif pada investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta menimbulkan persepsi ketidakadilan yang mendalam di masyarakat. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 10 Tahun 2020 telah mengatur standar kualitas dan sanksi tegas bagi pelanggaran, namun kasus ini menunjukkan adanya celah.

Hartanto, et al. (2025) dalam penelitiannya yang berjudul Menegakkan Keadilan dalam Pengelolaan Sumber Daya menjelaskan bahwa kasus korupsi pengoplosan bahan bakar minyak oleh PT. Pertamina Patra Niaga, yang menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam Pancasila sila ke-5. Sejalan dengan itu, Sinambela (2025) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Framing Model Robert N. Entman pada Kasus Korupsi Pertamina: Studi pada Kompas.com dan Tempo.co, menjelaskan bahwa sentimen masyarakat di platform X (sebelumnya Twitter) terhadap kasus korupsi PT. Pertamina (Persero) yang mencuat pada awal tahun 2025. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan algoritma *Support Vector Machine* (SVM) sebagai metode klasifikasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi penurunan kepercayaan publik sebagai konsekuensi dari korupsi Pertamina oplosan. Serupa dengan pembahasan kedua penelitian sebelumnya, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan korupsi Pertamina oplosan dan dampaknya terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, institusi penegak hukum, dan BUMN (PT. Pertamina).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji dampak korupsi Pertamina oplosan terhadap kepercayaan publik. Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan data yang bersumber dari dokumen yang ada. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan analisis isi media serta artikel jurnal yang membahas kasus korupsi Pertamina oplosan dan implikasinya terhadap masyarakat. Data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti artikel berita, publikasi akademik, dan dokumen kebijakan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola persepsi publik dan dampak sosial-ekonomi yang muncul akibat praktik korupsi tersebut.

Hasil dan Pembahasan

A. Modus Operandi dan Kerugian Negara Akibat Korupsi Pertamina Oplosan

Kasus korupsi Pertamina oplosan yang terjadi sepanjang tahun 2018 hingga 2023 dan terungkap pada awal 2025 menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah tata kelola energi Indonesia. Praktik pengoplosan ini melibatkan pembelian BBM RON 90 dengan harga yang dibayarkan seolah-olah berupa RON 92, kemudian mencampurnya di depo swasta tidak resmi dan mendistribusikannya ke SPBU sebagai Pertamina asli. Korupsi

yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur tersebut menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, yakni diperkirakan mencapai Rp 193,7 triliun (Celios dan LBH Jakarta, 2025; Grehenson, 2025). Angka ini mencerminkan kebocoran masif pada sektor energi nasional, yang seharusnya menjadi salah satu pilar utama pendapatan negara. Kerugian ini bahkan lebih besar dari beberapa alokasi anggaran strategis negara seperti anggaran kesehatan, pendidikan, atau pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, skandal ini bukan hanya masalah kriminalitas korporasi, tetapi juga merupakan ancaman langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Terdapat tujuh orang yang didakwa dalam kasus ini termasuk pejabat tinggi sub holding pertamina dan perusahaan swasta. Pejabat yang ikut terlibat dari PT. Pertamina diantaranya Riva Siahaan sebagai Direktur Utama, kemudian dari PT. Kilang Pertamina Internasional yaitu Sani Dinar Saifuddin dan Agus Purwono, dari PT. Pertamina International Shipping yaitu Yoki Firnandi sebagai direktur utama. Pihak swasta yang terlibat antara lain MKAR sebagai pemilik PT. Navigator Khatulistiwa, DW sebagai komisaris PT. Navigator Khatulistiwa dan PT. Jenggala Maritim, serta GRJ sebagai komisaris PT. Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT. Orbit Terminal Perak. Mereka diduga melakukan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang, termasuk pembelian BBM berkualitas rendah yang kemudian dioplos menjadi pertamax dan didistribusikan kepada konsumen (Prabowo, 2025; Setuningsih, 2025).

Di depo penyimpanan, seperti depo PT Orbit Terminal Merak yang dikelola oleh pihak swasta, BBM berkualitas rendah ini dicampur atau dicampur secara ilegal dengan BBM RON 92. Menggabungkan proses ini menghasilkan produk yang secara fisik dan dilabelkan sebagai Pertamax (RON 92). Namun, kualitasnya kurang karena bercampurnya BBM dengan oktan di bawah standar Pertamax. Proses pengoplosan Pertamax secara khusus dimulai dengan PT Pertamina Patra Niaga membeli dan membayar BBM dengan harga RON 92 (Pertamax). Namun, BBM dengan oktan lebih rendah, seperti RON 90 (Pertalite) dan bahkan RON 88 (Premium), diterima dan disimpan. Di depo penyimpanan, seperti depo PT Orbit Terminal Merak yang dikelola oleh pihak swasta, BBM berkualitas rendah ini dicampur atau dicampur secara ilegal dengan BBM RON 92. Menggabungkan proses ini menghasilkan produk yang secara fisik dan dilabelkan sebagai Pertamax (RON 92). Namun, kualitasnya kurang karena tercampurnya BBM dengan oktan di bawah standar Pertamax. Setelah pengoplosan, BBM dikirim ke SPBU dan dibeli oleh pelanggan dengan harga Pertamax yang lebih tinggi, meskipun kualitasnya tidak memenuhi standar RON 92 yang dijanjikan. Kasus ini berlangsung dari 2018 hingga 2023 dan melibatkan pejabat tinggi di subholding Pertamina serta pihak swasta yang berkolusi dalam pengadaan, pengelolaan, dan distribusi bahan bakar oplosan. Prosesnya terdiri dari pembelian BBM RON 92 secara administratif, penerimaan dan penyimpanan BBM RON 90/88, pencampuran ilegal di

gudang, dan pembagian BBM oplosan kepada pelanggan dengan label dan harga Pertamina (Rahmani, 2025; Setiawan, 2025).

B. Dampak Multidimensional Korupsi Pertamina Oplosan

Korupsi Pertamina oplosan bukan sekadar kejahatan ekonomi yang merugikan negara secara finansial, namun juga memiliki dampak multidimensional yang jauh lebih luas, utamanya terhadap kepercayaan publik. Kasus ini menjadi cerminan buruk tata kelola dan integritas, memicu keraguan mendalam di benak masyarakat terhadap berbagai sektor.

Dampak Ekonomi

Korupsi Pertamina oplosan secara langsung menyerang sendi-sendi ekonomi negara dan masyarakat, menciptakan kerugian beruntun yang pada akhirnya menggerus kepercayaan.

- a) Kerugian Finansial bagi Negara dan BUMN. Praktik pengoplosan Pertamina berarti penjualan bahan bakar dengan kualitas di bawah standar namun dibanderol dengan harga premium. Selisih harga tersebut, yang seharusnya menjadi keuntungan bagi BUMN seperti Pertamina dan pada akhirnya berkontribusi pada pendapatan negara, justru dinikmati oleh para koruptor. Ini jelas-jelas menciptakan kerugian negara miliaran rupiah, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, atau subsidi yang lebih tepat sasaran. Masyarakat melihat bagaimana uang negara "bocor" akibat ulah oknum, menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas pengelolaan keuangan negara.
- b) Distorsi Pasar dan Persaingan Tidak Sehat. Kehadiran Pertamina oplosan di pasar menciptakan lingkungan persaingan yang tidak adil. Oknum yang menjual produk oplosan bisa menawarkan harga yang (mungkin terlihat) lebih murah atau mendapatkan keuntungan jauh lebih besar karena biaya produksi yang ditekan secara ilegal. Hal ini merugikan SPBU atau distributor resmi yang beroperasi sesuai standar dan aturan. Distorsi pasar semacam ini mengurangi insentif bagi pelaku usaha yang jujur dan menimbulkan asumsi di masyarakat bahwa bisnis yang "bersih" sulit bersaing.
- c) Potensi Penurunan Investasi di Sektor Energi. Kasus korupsi yang masif di sektor energi dapat menimbulkan keraguan bagi calon investor, baik domestik maupun asing. Mereka akan mempertimbangkan risiko tingginya praktik ilegal, ketidakpastian regulasi, dan lemahnya penegakan hukum. Jika investor enggan menanamkan modalnya, inovasi dan pengembangan infrastruktur di sektor energi bisa terhambat, yang pada gilirannya menurunkan kepercayaan publik terhadap prospek stabilitas ekonomi dan kemajuan negara.
- d) Kerugian bagi Konsumen (Kerusakan Kendaraan, Performa Buruk). Dampak paling langsung dan dirasakan oleh masyarakat adalah kerugian pribadi. Konsumen membayar untuk Pertamina asli dengan kualitas tinggi, tetapi malah mendapatkan

bahan bakar oplosan yang tidak memenuhi standar. Ini bisa menyebabkan kerusakan pada mesin kendaraan, penurunan performa, dan biaya perawatan yang tidak terduga. Kerugian materiil ini memicu rasa frustrasi, kemarahan, dan yang paling penting, hilangnya kepercayaan konsumen terhadap integritas produk yang dijual dan pengawasan pemerintah terhadap kualitas bahan bakar.

Dari perspektif ekonomi, dampak kasus Pertamina oplosan dapat dilihat dari sejumlah indikator penting. Kerugian negara sebesar ratusan triliun rupiah tentu berdampak pada menurunnya kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional, seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, bantuan sosial, dan program strategis lainnya. Kebocoran ini menandakan bahwa keuntungan Pertamina sebagai BUMN strategis tidak maksimal masuk ke kas negara, padahal keuntungan tersebut sangat penting untuk menopang berbagai kebijakan publik. Selain kerugian negara, masyarakat pun menanggung dampak langsung yang sangat besar. Masyarakat mengalami kerugian mencapai Rp 47 miliar per hari akibat penggunaan Pertamina oplosan. Jika dihitung selama lima tahun, kerugian ini mencapai lebih dari Rp 85 triliun, angka yang menunjukkan bagaimana masyarakat menjadi korban terbesar dari praktik korupsi ini. Kerugian tersebut berasal dari biaya perbaikan kendaraan, meningkatnya konsumsi bahan bakar akibat kualitas oktan yang rendah, hingga hilangnya produktivitas karena kendaraan mengalami kerusakan tiba-tiba (Yonatan, 2025).

Survei Celios pada 2025 semakin menegaskan besarnya dampak yang dirasakan konsumen. Sebanyak 55,3% konsumen melaporkan kerusakan mesin akibat penggunaan Pertamina oplosan, sementara 86,4% konsumen merasa dirugikan secara ekonomi dan 62,7% menyatakan kualitas Pertamina menurun selama periode 2018–2023. Kerusakan yang dialami konsumen meliputi kerusakan pada injektor, catalytic converter, penurunan tenaga mesin, hingga potensi kerusakan permanen pada ruang bakar. Kerusakan tersebut membutuhkan biaya perbaikan minimal dua hingga lima juta rupiah, dan bila terjadi kerusakan berat dapat mencapai belasan juta rupiah. Jika dikalikan dengan jumlah pengguna Pertamina di Indonesia, maka total kerusakan yang ditanggung masyarakat mencapai belasan hingga puluhan triliun rupiah. Dampak ekonomi jangka panjang lainnya adalah penurunan kepercayaan konsumen terhadap Pertamina sehingga berdampak pada turunnya penjualan Pertamina sebesar 5% pada Februari 2025, menunjukkan bagaimana krisis kepercayaan publik telah memengaruhi perilaku konsumsi (Djumeni, 2025).

Dampak Sosial

Selain dampak ekonomi, kasus Pertamina oplosan juga menimbulkan dampak sosial yang cukup serius. Korupsi ini menciptakan rasa ketidakadilan sosial di masyarakat, karena di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, justru segelintir pejabat dan pelaku usaha dapat memperkaya diri dengan cara merugikan banyak orang. Publik merasa

dikhianati karena membeli BBM dengan harga premium namun menerima kualitas rendah. Sementara itu para pelaku korupsi menikmati keuntungan besar dari praktik ilegal tersebut. Rasa marah dan frustrasi ini memicu meningkatnya keresahan sosial, seperti hilangnya kepercayaan antarwarga dalam menentukan SPBU mana yang menjual BBM aman atau tidak. SPBU resmi yang sebenarnya tidak terlibat pun ikut tercoreng reputasinya karena publik tidak bisa lagi membedakan mana yang menjual Pertamina asli atau oplosan. Hal ini menyebabkan terjadinya disrupsi kepercayaan sosial yang dapat memengaruhi hubungan antar pelaku usaha dan konsumen dalam jangka panjang.

Penurunan kualitas hidup masyarakat juga menjadi dampak sosial yang nyata. Banyak pekerja yang mengandalkan kendaraan sebagai sumber penghasilan, seperti ojek online, sopir angkot, dan pelaku UMKM, mengalami penurunan pendapatan akibat kerusakan kendaraan dan meningkatnya biaya operasional. Aktivitas masyarakat menjadi terganggu karena kendaraan tidak bisa digunakan secara optimal, menghambat mobilitas harian seperti bekerja, mengantar anak sekolah, atau menjalankan aktivitas ekonomi lainnya. Keresahan sosial ini diperparah oleh meningkatnya perbincangan negatif di media sosial yang menunjukkan kekecewaan publik terhadap pemerintah, Pertamina, dan aparat penegak hukum yang dianggap tidak mampu melindungi kepentingan rakyat.

Korupsi Pertamina oplosan juga mengikis fondasi sosial, memunculkan ketidakpuasan dan merusak tatanan kebersamaan.

- a) Ketidakadilan dan Kesenjangan Sosial. Kasus korupsi ini menyoroti bagaimana segelintir oknum bisa memperkaya diri secara ilegal di tengah kesulitan ekonomi masyarakat. Para pelaku korupsi menikmati keuntungan miliaran sementara masyarakat umum harus menanggung kerugian, baik dari sisi finansial maupun kualitas hidup. Ini menciptakan persepsi ketidakadilan yang mendalam dan memperlebar jurang kesenjangan sosial, yang pada gilirannya mengikis kepercayaan pada sistem hukum dan keadilan.
- b) Potensi Konflik dan Keresahan Masyarakat. Ketidakpuasan akibat kerugian dan ketidakadilan dapat memicu keresahan di kalangan masyarakat. Rasa tertipu dan marah bisa berkembang menjadi protes atau bahkan potensi konflik sosial, terutama jika penanganan kasus dianggap lamban atau tidak transparan. Adanya praktik curang ini juga dapat menimbulkan kecurigaan antarwarga, misalnya terkait SPBU mana yang menjual oplosan atau siapa saja yang terlibat, yang mengganggu kohesi sosial (Cindy, 2025).
- c) Penurunan Kualitas Hidup Masyarakat (Jika Terjadi Kerusakan pada Kendaraan). Bagi sebagian besar masyarakat, kendaraan adalah alat transportasi esensial untuk bekerja, sekolah, atau menjalankan aktivitas sehari-hari. Kerusakan kendaraan akibat Pertamina oplosan berarti terganggunya mobilitas, hilangnya waktu produktif, dan pengeluaran tak terduga untuk perbaikan. Hal ini secara langsung menurunkan

kualitas hidup, menambah beban ekonomi, dan memperburuk rasa tidak aman di tengah masyarakat.

Dampak Politik dan Tata Kelola

Dampak politik dan tata kelola menjadi aspek yang paling fundamental dalam kasus ini karena berkaitan langsung dengan tingkat kepercayaan atau legitimasi institusi negara. Skandal pertamax oplosan memperlihatkan kelemahan besar dalam sistem pengawasan dan tata kelola energi di Indonesia. Pemerintah dianggap gagal menjalankan tanggung jawabnya dalam memastikan bahwa BBM yang beredar memenuhi standar kualitas nasional. Kementerian ESDM, Pertamina, dan lembaga pengawasan internal dinilai tidak efektif dalam mendeteksi celah korupsi yang berlangsung selama lima tahun. Fakta bahwa depot swasta ilegal mampu beroperasi dalam jangka waktu panjang menunjukkan lemahnya regulasi, pengawasan, dan transparansi dalam distribusi BBM. Ketika pengawasan negara gagal, maka praktik kriminal yang merugikan publik dapat terus berlangsung tanpa hambatan.

Korupsi Pertamina oplosan adalah pukulan telak bagi legitimasi pemerintah dan institusi penegak hukum, yang berimbas langsung pada kepercayaan publik terhadap sistem.

- a) Pelemahan Institusi Pemerintah dan Penegak Hukum. Terkuaknya kasus korupsi semacam ini, terutama yang melibatkan oknum atau celah dalam sistem, menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan integritas lembaga-lembaga pemerintah serta aparat penegak hukum. Jika masyarakat melihat bahwa penindakan terhadap koruptor tidak tegas, proses hukum berlarut-larut, atau ada indikasi kolusi, maka kepercayaan terhadap institusi-institusi negara akan melemah secara signifikan. Ini merusak kewibawaan dan kredibilitas negara di mata rakyatnya.
- b) Tantangan terhadap Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi. Kasus korupsi Pertamina oplosan menunjukkan bahwa upaya reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi masih menghadapi tantangan besar. Adanya praktik ini mengindikasikan bahwa sistem pengawasan internal, mekanisme audit, dan integritas pegawai masih perlu diperkuat. Jika upaya pemberantasan korupsi dianggap gagal membongkar dan menindak tuntas kasus sebesar ini, maka keyakinan publik terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi akan luntur.
- c) Munculnya Persepsi Negatif terhadap Kapabilitas Pemerintah dalam Mengelola Sektor Energi. Sektor energi adalah sektor vital yang sangat strategis bagi keberlangsungan negara. Kasus Pertamina oplosan menimbulkan keraguan besar di masyarakat mengenai kemampuan pemerintah, khususnya Kementerian (ESDM) dan Pertamina, dalam mengelola dan mengawasi sektor ini secara efektif. Persepsi negatif ini bisa meluas dan menimbulkan pertanyaan tentang kapabilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya dan layanan publik lainnya, yang pada akhirnya sangat merusak kepercayaan publik secara keseluruhan.

C. Korupsi Pertamina Oplosan dan Penurunan Kepercayaan Publik

Kasus korupsi Pertamina oplosan merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang di sektor energi yang menimbulkan kerugian besar, baik bagi negara maupun masyarakat. Praktik ini biasanya dilakukan dengan cara mencampur Pertamina dengan bahan bakar berkualitas rendah seperti Premium atau solar industri, memanipulasi laporan distribusi dan stok BBM, hingga menjual bahan bakar oplosan seolah-olah merupakan produk asli. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian negara mencapai miliaran rupiah dan menimbulkan rasa kecewa di kalangan masyarakat karena merasa dirugikan akibat kualitas bahan bakar yang tidak sesuai dengan harga dan standar mutu. Lebih jauh lagi, peristiwa ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga pengelola energi yang dianggap gagal menjalankan pengawasan secara maksimal. Korupsi dalam kasus Pertamina oplosan berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik. Pemerintah dianggap tidak mampu mengawasi secara efektif, sedangkan citra perusahaan negara seperti Pertamina turut tercoreng karena dianggap kehilangan tanggung jawab moral dalam mengelola energi nasional. Selain itu, aparat penegak hukum juga dinilai kurang transparan dan lamban dalam menangani kasus ini, sehingga memperkuat pandangan masyarakat bahwa korupsi di sektor publik sudah menjadi praktik yang berakar. Akibatnya, publik mulai meragukan kejujuran, profesionalisme, dan integritas para pejabat serta institusi yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat. Banyak masyarakat yang menilai bahwa proses hukum terhadap kasus ini berjalan lambat, tidak transparan, dan kurang tegas. Sejumlah aktor penting memang telah ditetapkan sebagai tersangka, namun publik melihat masih ada banyak pihak yang seharusnya bertanggung jawab namun belum tersentuh hukum. Hal ini memperkuat persepsi bahwa hukum di Indonesia masih tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Jika aparat penegak hukum tidak mampu menyelesaikan kasus korupsi sebesar ini secara adil, maka tingkat kepercayaan publik terhadap integritas lembaga hukum akan semakin melemah. Melemahnya kepercayaan ini berbahaya karena menjadi akar ketidakpatuhan sosial terhadap aturan negara.

Penurunan kepercayaan publik ini dapat dilihat melalui sejumlah indikator penting, di antaranya melemahnya persepsi terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintah, turunnya keyakinan terhadap integritas pejabat publik, berkurangnya kepuasan terhadap pelayanan publik, serta menurunnya kepercayaan terhadap keadilan hukum. Masyarakat menilai bahwa proses audit dan pengawasan distribusi BBM tidak dilakukan secara terbuka, pelaku utama korupsi sering tidak menerima hukuman yang setimpal, dan kualitas pelayanan publik menurun akibat praktik manipulatif tersebut. Gejala ini terlihat dari meningkatnya kritik masyarakat di media sosial, rendahnya tingkat kepuasan terhadap mutu bahan bakar, serta turunnya hasil survei kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dan BUMN energi.

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi Pertamina oplosan telah menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga pengelola energi nasional. Korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian material, tetapi juga merusak modal sosial berupa kepercayaan publik yang menjadi dasar legitimasi pemerintahan. Oleh karena itu, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, perlu dilakukan langkah-langkah strategis seperti memperketat pengawasan distribusi BBM, meningkatkan keterbukaan hasil audit, menegakkan hukum secara tegas dan adil, serta memperbaiki komunikasi publik agar lebih transparan dan bertanggung jawab. Tanpa langkah-langkah nyata tersebut, kepercayaan publik akan terus menurun, dan legitimasi pemerintah dalam mengelola sumber daya energi akan semakin melemah.

Di luar kerugian material dan ketimpangan sosial yang muncul, persoalan Pertamina oplosan juga menggambarkan rapuhnya tata kelola risiko dalam industri energi. Produk BBM merupakan kebutuhan strategis yang menyangkut hampir seluruh aktivitas masyarakat, sehingga pengawasannya semestinya mengikuti prinsip kehati-hatian yang ketat. Adanya kelengahan dalam sistem verifikasi mutu, lemahnya inspeksi lapangan, serta minimnya audit terpercaya menunjukkan bahwa manajemen risiko di sektor energi masih ditangani secara administratif, belum menyentuh pengawasan berbasis teknologi maupun pengawasan publik. Negara lain seperti Jepang dan Korea Selatan menerapkan sistem real-time monitoring berbasis sensor digital untuk memastikan kualitas BBM di titik distribusi, sedangkan Indonesia masih bertumpu pada laporan manual yang rentan direayasa. Ketimpangan teknologi pengawasan inilah yang membuka ruang kolusi antara oknum pengelola depo dan pejabat di level keputusan.

Selain itu, fenomena Pertamina oplosan memperlihatkan pola korupsi yang tidak lagi bersifat sporadis, tetapi melibatkan jaringan yang bekerja layaknya organisasi bisnis tersembunyi. Modus pelanggaran berlangsung secara sistematis, terencana, dan berulang dalam kurun waktu lima tahun, sehingga tidak bisa dipandang sebagai penyimpangan individual. Pola ini sesuai dengan konsep *state capture corruption*, yaitu kondisi ketika pelaku bisnis dan pejabat membentuk struktur yang mampu mempengaruhi kebijakan dan distribusi sumber daya publik demi keuntungan pribadi (Fiebelkorn, 2019). Dalam konteks Pertamina oplosan, sejumlah aktor memiliki akses pada proses pengadaan, distribusi, hingga penentuan kualitas, sehingga mampu memonopoli kontrol terhadap BBM tanpa deteksi berarti. Kasus ini membuktikan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya soal menghukum individu, melainkan menata ulang sistem yang memungkinkan kejahatan publik berlangsung panjang tanpa hambatan.

Hilangnya kepercayaan publik juga diperparah oleh komunikasi pemerintah yang cenderung defensif. Alih-alih menjelaskan persoalan secara terbuka, sejumlah pejabat lebih fokus membantah dampak kerusakan kendaraan atau membela institusi. Komunikasi semacam itu menimbulkan kesan bahwa negara sedang menyembunyikan informasi krusial dari masyarakat. Padahal teori *public accountability* menegaskan bahwa transparansi adalah pondasi legitimasi negara. Keterbukaan informasi bukan hanya bentuk tanggung jawab, melainkan juga mekanisme pencegah kecurigaan publik. Ketika negara terkesan lambat menjelaskan bukti ilmiah dan progres penegakan hukum, ruang spekulasi akan semakin melebar dan memperdalam ketidakpercayaan kolektif (Han, 2017; Bovens, et al, 2014).

Dalam perspektif sosial-politik, penurunan rasa percaya terhadap pemerintah akan berdampak pada sikap publik terhadap kebijakan lain yang tidak berhubungan langsung dengan energi. Ketika masyarakat merasa bahwa hak mereka sebagai konsumen diabaikan, mereka cenderung menolak kebijakan yang menyangkut hajat hidup, seperti penentuan subsidi energi, revisi regulasi migas, atau perubahan harga bahan bakar. Kondisi ini dapat menimbulkan resistensi sosial dan memperlambat agenda pembangunan nasional. Bahkan, keengganan publik untuk bekerja sama dengan kebijakan pemerintah berpotensi menimbulkan biaya administratif yang lebih tinggi karena negara harus mengeluarkan usaha ekstra untuk meyakinkan masyarakat.

Oleh karena itu, pemulihan kepercayaan tidak dapat diselesaikan hanya dengan menghukum pelaku. Diperlukan transformasi tata kelola yang memungkinkan publik ikut mengawasi kualitas BBM melalui sistem terbuka, misalnya aplikasi cek oktan berbasis blockchain, sertifikasi mutu yang dapat diakses konsumen, inspeksi bersama antara pemerintah dan universitas, serta publikasi bulanan hasil audit kilang dan depo. Tanpa keterlibatan publik dalam pengawasan, pemerintahan akan selalu tertinggal dari praktik kejahatan korporasi yang dinamis. Kesiapan untuk menjadikan publik sebagai bagian dari pengontrol kebijakan merupakan langkah strategis untuk membangun kembali kepercayaan sosial yang telah rusak oleh skandal Pertamina oplosan.

Kasus Pertamina oplosan juga memperlihatkan kegagalan reformasi birokrasi, terutama dalam upaya menciptakan tata kelola BUMN yang transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan. BUMN seharusnya menjadi contoh tata kelola yang bersih, namun kenyataannya justru menjadi tempat subur bagi praktik korupsi terstruktur. Fakta ini memperburuk persepsi internasional terhadap Indonesia, terutama dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang masih stagnan di angka 34/100 (Ulya dan Prabowo, 2024). Investor asing menjadi semakin ragu untuk masuk ke sektor energi Indonesia karena melihat tingginya risiko korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Jika kondisi ini tidak diperbaiki, maka Indonesia akan kesulitan menarik investasi yang dibutuhkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional di masa depan.

Pada akhirnya, dampak paling menentukan dari kasus ini adalah penurunan drastis kepercayaan publik terhadap pemerintah, Pertamina, dan sistem hukum. Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting bagi keberlangsungan negara. Ketika modal sosial ini rusak, maka hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi rapuh. Survei Celios yang menunjukkan bahwa lebih dari 86% masyarakat merasa dirugikan, 55% mengalami kerusakan kendaraan, dan 62% menganggap kualitas Pertamina menurun merupakan bukti nyata bahwa publik merasa dikhianati (Celios dan LBH Jakarta, 2025). Penurunan kepercayaan publik dapat berlanjut menjadi delegitimasi kebijakan, penolakan terhadap program pemerintah, hingga ketidakstabilan politik dalam jangka panjang. Jika pemerintah tidak segera melakukan pembaruan tata kelola, memperkuat sistem pengawasan, menegakkan hukum secara tegas, serta meningkatkan transparansi, maka kepercayaan publik yang hilang akan semakin sulit dipulihkan.

Secara keseluruhan, korupsi Pertamina oplosan bukan sekadar kasus kriminal, tetapi mencerminkan masalah struktural dalam tata kelola energi, ekonomi, sosial, dan politik Indonesia. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara secara finansial, tetapi juga oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, serta oleh pemerintah dalam bentuk menurunnya legitimasi publik. Oleh karena itu, kasus ini harus menjadi momentum perubahan untuk memperbaiki tata kelola BUMN, memperkuat regulasi sektor energi, meningkatkan integritas aparat pengawasan, serta membangun kembali kepercayaan publik melalui transparansi dan penegakan hukum yang adil. Tanpa langkah-langkah fundamental tersebut, Indonesia akan terus terjebak dalam siklus korupsi yang melemahkan pembangunan nasional dan merugikan rakyat.

Kesimpulan

Kasus korupsi Pertamina oplosan merupakan salah satu bentuk penyimpangan besar dalam tata kelola energi nasional yang menimbulkan dampak luas di berbagai bidang, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Praktik pengoplosan bahan bakar ini tidak hanya menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah, tetapi juga melanggar hak konsumen serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, terutama PT Pertamina dan pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab atas pengawasan sektor energi. Kasus ini menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan, rendahnya transparansi, serta adanya celah integritas dalam proses distribusi BBM yang memungkinkan terjadinya kolusi antara pejabat BUMN dan pihak swasta.

Dari sisi ekonomi, pengoplosan Pertamina menyebabkan keuntungan negara yang semestinya masuk ke kas publik justru diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini juga menimbulkan ketidakseimbangan pasar, menurunkan minat investasi di sektor energi, serta menimbulkan kerugian langsung bagi masyarakat berupa kerusakan kendaraan dan turunnya kualitas bahan bakar. Secara

sosial, tindakan korupsi ini memperlebar kesenjangan antara masyarakat dan elite ekonomi, menimbulkan rasa ketidakadilan, keresahan, serta kekecewaan di kalangan publik karena sebagian kecil orang memperkaya diri di tengah penderitaan banyak pihak. Sementara dari aspek politik dan tata kelola, kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal, ketidaktegasan aparat hukum, serta belum optimalnya upaya pemberantasan korupsi, yang pada akhirnya menurunkan legitimasi pemerintah dan memicu krisis kepercayaan publik.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa korupsi pertamax oplosan telah menimbulkan penurunan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, BUMN, dan sistem hukum di Indonesia. Masyarakat merasa dikhianati karena kepercayaan yang selama ini diberikan tidak diimbangi dengan tanggung jawab moral dan profesionalitas dari pihak yang berwenang. Jika tidak ditangani secara serius dan transparan, penurunan kepercayaan ini dapat berakibat jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi nasional dan legitimasi pemerintah. Oleh sebab itu, diperlukan langkah konkret berupa penegakan hukum yang adil, penguatan sistem pengawasan distribusi BBM, peningkatan transparansi publik, serta reformasi tata kelola energi untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan mengembalikan citra pemerintah serta Pertamina sebagai pengelola energi yang kredibel dan bertanggung jawab.

Referensi

- Akhyar, A. (2025, Maret). Ironis, Kepercayaan Rakyat Menurun Karena Dugaan Pertamina Oplosan, Sudirman Said: It is a Matter of Credibility. *tvonenews.com*. <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/306430-ironis-kepercayaan-rakyat-menurun-karena-dugaan-pertamax-oplosan-sudirman-said-it-is-a-matter-of-credibility>
- Berapa Banyak Kerugian Masyarakat dari Pertamina Oplosan? Rekap Hasil Pengaduan Masyarakat dan Modelling Consumer Loss*. (2025). Celios dan LBH Jakarta. <https://celios.co.id/wp-content/uploads/2025/03/Laporan-Rekapitulasi-Aduan-Pertamax-Oplosan-LBH-Jakarta-Celios.pdf#:~:text=Total%20kerugian%20masyarakat%20akibat%20pengoplosan%20BBM%20selama,PDB%20sebesar%20Rp13%2C35%20triliun%20pada%20tahun%202023>.
- Bologne, J. (1993). *Handbook on corporate fraud: Prevention, detection, and investigation*. Butterworth-Heinemann.
- Bovens, M., Goodin, R. E., dan Schillemans, T. (2014b). *Public accountability The Oxford Handbook Public Accountability*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199641253.001.0001>
- Cindy, P. R. (2025, 1 Maret). *Kronologi Pertamina Oplosan Berujung Warga Beralih ke SPBU Swasta*. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/64424/kronologi-pertamax-oplosan-berujung-warga-beralih-ke-spbu-swasta>

- Djumena, E. (2025). *Akui Penjualan Pertamina Turun, Pertamina: Itu Hanya Satu Hari*. <https://money.kompas.com/read/2025/02/26/160912826/akui-penjualan-pertamax-turun-pertamina-itu-hanya-satu-hari>
- Fiebelkorn, A. (2019). *Governance Global Practice State Capture Analysis: How to Quantitatively Analyze the Regulatory Abuse by Business-State Relationships* Andreas Fiebelkorn. Discussion Paper No. 2. World Bank Group. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/785311576571172286/pdf/State-Capture-Analysis-How-to-Quantitatively-Analyze-the-Regulatory-Abuse-by-Business-State-Relationships.pdf>
- Grehenson, G. (2025). *Pragmatisme, Kesenakahan dan Kegagalan Membangun Sistem jadi Akar Persoalan Korupsi di Indonesia*. <https://ugm.ac.id/id/berita/pragmatisme-keserakahan-dan-kegagalan-membangun-sistem-jadi-akar-persoalan-korupsi-di-indonesia/>
- Han, Y. (2017). Theory and Measurement for Public Accountability Research. *Academy of Management Proceedings*. 2016(1). <https://doi.org/10.5465/ambpp.2016.13388abstract>
- Hartanto, D. V., Navrizal, F., Surya, F., Berlanty, H., & Naufal, M. (2025). Menegakkan Keadilan dalam Pengelolaan Sumber Daya. *Inspirasi & Strategi (INSPIRAT): Jurnal Kebijakan Publik & Bisnis*, Vol.16, No. 01, 1-4. Retrieved Juni 20, 2025, from <https://ejournal.isha.or.id/index.php/Inspirat/article/view/400>
- Lamijan, M.T. (2022). Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 3(02). <https://doi.org/10.61689/jpehi.v3i02.381>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Prabowo, D. (2025, 25 Februari). *Kejagung Ungkap Peran 7 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/25/07531671/kejagung-ungkap-peran-7-tersangka-kasus-dugaan-korupsi-tata-kelola-minyak>.
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2023, 15 Februari). Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>
- Putri, R. A. (2023). Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Di Indonesia. *Karimah Tauhid*, 2(5). <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i5.9000>
- Rahmani, N.P. (2025, 25 Februari). Kejagung: Tersangka kasus minyak mentah oplos RON 90 jadi RON 92. *Antara, Kantor Berita Indonesia*. <https://www.antaraneews.com/berita/4673125/kejagung-tersangka-kasus-minyak-mentah-oplos-ron-90-jadi-ron-92>
- Setiawan, V.N. (2025, 28 February). Kejagung Usut PT Orbit Terminal Soal Blending BBM RON 92 Pertamina. *CNBC Indonesia*.

- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250228143456-4-614483/kejagung-usut-pt-orbit-terminal-soal-blending-bbm-ron-92-pertamax>
- Setuningsih, N. (2025). *Kejagung Tetapkan Dirut Pertamina Patra Niaga Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/25/06042171/kejagung-tetapkan-dirut-pertamina-patra-niaga-jadi-tersangka-dugaan-korupsi>
- Sinambela, L. (2025, April). Analisis Framing Model Robert N. Entman pada Kasus Korupsi Pertamina: Studi pada Kompas.com dan Tempo.co. *Law and Communication Journal, Vol.1, No.1*. <https://jurnalsjam.com/lcj/article/view/10>
- Ulya, F. N. dan Prabowo, P. (2024, 30 Januari). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia: Skor Stagnan di Angka 34 Tahun 2023, Peringkat Turun 5 Poin*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/30/14304521/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-skor-stagnan-di-angka-34-tahun-2023>
- What is corruption?* (n.d.). *International Transparency*. <https://www.transparency.org/en/what-is-corruption>
- Yonatan, A. Z. (2025). Masyarakat Rugi Rp47 Miliar per Hari Akibat Oplosan BBM Pertamina. Retrieved Juni 25, 2025, from https://goodstats.id/article/masyarakat-rugi-rp47-miliar-per-hari-akibat-oplosan-bbm-pertamax-lAJwM#google_vignette